

Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa : Objek Studi Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

Winda Kustiawan, Nuraina Nabilah, Saipul Bahri, Haddad Alwi Syihab, Khairunnisa Syakira

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nurainanabilah2000@gmail.com

Abstrak

Komunikasi politik adalah setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk memperoleh pengaruh terhadap penyebaran atau penggunaan kekuasaan di tengah masyarakat yang didalamnya mengandung 4 bentuk komunikasi yaitu : elite communication, hegemonic communication, petitionary communication, associational communication. Komunikasi politik juga bisa diartikan dalam pengertian sempit dan pengertian luas . Dalam artian sempit, komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun terucap, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Dalam artian luas, komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan khususnya yang bermuatan informasi politik dari suatu sumber kepada jumlah penerima pesan. Dalam jurnal terdapat gambaran komunikasi yang dilakukan oleh calon kepala desa, desa Marindal 1 dalam pemilihan pilkades, guna menarik minat rakyat untuk memilih salah satu dari mereka (calon kepala desa). Dia hanya menggambarkan komunikasi yang digunakan para calon kepala desa, namun juga menggambarkan efek yang didapatkan oleh masyarakat desa Marindal 1.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang sekaligus juga merupakan negara demokrasi, yang di mana salah satu ciri khas negara demokrasi adalah kedaulatan negaranya ada di tangan rakyat.

Abraham Lincoln presiden Amerika Serikat yang ke-16, yang dikenal sebagai bapak demokrasi menjelaskan , bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dalam hal ini, rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan, dan termasuk aktivitas politik di dalamnya.

Di Indonesia, penerapan demokrasi didasarkan oleh Pancasila dengan sila ke-4 yang berbunyi " *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan*" yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima.

Pemilihan kepala desa, ada yang sering disebut juga dengan Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh warga di desa setempat.

Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pemilihan kepala desa atau Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos gambar dari salah satu kandidat yang ingin dipilih oleh

orang yang memilih hak untuk memilihnya, secara jelas (jelas siapa yang dipilihnya dari gambar tersebut).

Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik padahal hakikatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkah yang diambil) ke dalam simbol-simbol atau gambaran pribadinya. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki, baik secara pribadi maupun secara kelompok yang diwujudkan dalam aktivitas sikap dan perilaku.

Dan dalam hal ini calon-calon kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa lah yang menjadi objek atas pantauan dari partisipasi masyarakat dalam memilih calon yang menurut mereka tepat.

Lalu apa sajakah langkah yang diambil para calon kandidat untuk memenangkan hati rakyat di desa Marindal 1 kecamatan batubara kabupaten Deli Serdang ?. Bagaimana respon masyarakat terhadap usaha politik yang telah dilakukannya ? . Apakah kandidat nomor 4 menjadi pemenang dalam pemilihan kepala desa desa Mandala 1 di tahun 2022 ? Dan bagaimana kinerja kandidat yang sudah terpilih ?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, di mana metode pengumpulan datanya dengan mengamati keadaan selama pra pemilihan hingga pasca pemilihan kepala desa, di desa Marindal 1.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan realitas dari objek penelitian ini dengan menonjolkan ciri, karakter, sifat, model, atau gambar tentang kondisi dan situasinya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap kelangsungan berjalannya proses pemilihan kepala desa. Di mana pemilihan tersebut melibatkan masyarakat.
2. Wawancara ringan (yang dilakukan dengan tidak terlalu kaku / mengobrol) , yang dilakukan kepada para saksi dan beberapa koordinator lapangan.
3. Dokumentasi, di mana penelitian ini juga di rujukan kepada dokumen-dokumen yang ada di jurnal sebelumnya, yang berkaitan dengan komunikasi politik maupun pemilihan kepala desa.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Komunikasi

Definisi Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Secara garis besar, dalam proses komunikasi harus ada unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian antar komunikator dan juga komunikasi.

Proses komunikasi memiliki makna pengiriman informasi atau pesan dari pengirim yaitu komunikator kepada penerima yaitu komunikan. Proses komunikasi bertujuan untuk mencapai saling pengertian antar kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.

2. Politik

Definisi Politik

Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu " politeia " dengan " polis" yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri yaitu negara, dan " teia" berarti urusan.

Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, kejadian, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan pelaksanaannya, di mana dalam pelaksanaannya membutuhkan kebijakan-kebijakan umum.

3. Komunikasi Politik

Definisi komunikasi politik Menurut Ahli :

1. Maswadi Rauf, beliau mengatakan bahwa komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.

Komunikasi politik dilihat dari dua dimensi, itu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor politik kepada pihak lain, yang di mana kegiatan tersebut bersifat empiris karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sementara itu, komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah melihat komunikasi politik merupakan salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.

2. Menurut Rusadi Kantaprawira yang merupakan seorang pakar hukum, beliau mengatakan bahwa komunikasi politik adalah hubungan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat. Baik itu pemikiran intern golongan, asosiasi, instansi ataupun sektor kehidupan politik pemerintah. Beliau melihat komunikasi politik dari sisi kegunaannya.

3. Astrid S. Soesanto, menurutnya komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama lembaga politik.

4. Roelofs dan Barn Lund , mereka berpendapat bahwa komunikasi politik adalah politik yang berbicara atau menempatkan masalah, lebih tepatnya aktivitas politik (politisasi) berbicara.

4.Pemilihan Kepala Desa

Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Dalam penelitian Sadu Wasistiono (1993) Pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat.

Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada moment ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 6 tahun ke depan. Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang. Pilpres, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan Pemilu Legislatif. Tak ketinggalan adalah Pilkades. Begitu menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya pemilihan kepala desa ini.

Dalam pelaksanaannya begitu mendetail keterkaitan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Sehingga, perlu ketelitian dari tiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya tersebut. Namun pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa dari pada saat pemilu pemilu yang lain. Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon pemimpin bukan lagi mutlak harus lagi penting. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih. Namun demikian sosialisasi program atau visi misi sering kali tidak dijadikan sebagai media kampanye atau pendidikan politik yang baik. Kedekatan pribadi, akan sering kali banyak dipakai oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya. Di sini unsur nepotisme masih begitu kental membudaya. Demikian juga dengan kolusi, hubungan baik dalam berbagai posisi juga banyak dijadikan sebagai unsur penentuan hak pilih. Demikian juga dengan unsur Money politik yang sering dijadikan iming-iming dorongan dalam pemilihan. Hal demikian akan menjadikan para calon harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Persaingan antar calon sering kali juga terjadi dengan berlebihan. Kalau demikian ini yang terjadi usaha penghapusan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) akan terasa sulit diwujudkan. Di sini pendidikan politik perlu dikembangkan. Kerelaan berkorban untuk kepentingan desa yang juga merupakan bagian dari bangsa dan negara ini tentu perlu diwujudkan. Tidak semua pengorbanan harus diukur dengan kontribusi uang. Kalau budaya maney politik di tingkat desa bisa dikikis, tentu sedikit demi sedikit di tingkat yang lebih atas hingga pemilihan presiden akan dapat diwujudkan proses pemilihan pelaksana pemerintahan yang jujur dan adil.

Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. Semula kita hanya mengenal pesta demokrasi secara langsung berupa Pilkades ini. Sehingga pelaksanaannya banyak keluar dari etika dan norma politik. Money

politic dengan berbagai bentuknya sulit sekali dihindari. Kemudian sejak era reformasi masyarakat dibudayakan dengan pemilihan pimpinan dengan cara pemilihan langsung. Dengan adanya pilkada di harapkan masyarakat dapat terlatih untuk peduli kepada pemimpinnya, serta sadar terhadap apa, siapa, dan bagaimana pemimpin yang akan di pilih nanti.

Hal yang menarik menjelang pilkades saat ini yakni adanya isu putra daerah. Akhir-akhir ini putra daerah dirasa menjadi salah satu syarat pendukung yang perlu dimiliki oleh seorang calon pemimpin desa. Sehingga tidak mengherankan jika seorang calon kepala desa menambahkan keterangan putra daerah pada setiap kampanyenya. Berdasarkan dari fenomena tersebut maka perlu pemikiran secara jernih tentang apa arti dari putra daerah itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan putra daerah adalah penduduk asli dari desa setempat.

Menurut Eep Saefullah Fatah dalam salah satu kolom politiknya, ada 4 jenis dari defenisi putra daerah, yakni pertama, putra daerah geologis atau biologis, yaitu seseorang yang dilahirkan dari daerah tersebut. Kategori ini dibagi menjadi, yakni seseorang yang dilahirkan di desa tersebut yang salah satu atau kedua orang tuanya berasal dari desa tersebut dan mereka yang tidak lahir di desa tersebut tapi memiliki orang tua yang berasal dari desa tersebut. Putra daerah ini terlintas hanya memiliki kepentingan pragmatis dengan daerah asalnya. Mereka menggunakan daerah hanya sebagai basis pemenuhan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Namun sebaliknya daerah itu pun sedikit banyak memperoleh keuntungan politik dan ekonomi dari mereka. Keempat, yakni putra daerah sosiologis, yaitu mereka yang bukan saja memiliki keterkaitan genealogis dengan daerah tersebut tetapi juga hidup, tumbuh, dan besar serta berinteraksi dengan masyarakat daerah tersebut. Mereka menjadi bagian sosiologis dari daerah tersebut.

Dalam pemilihan pemimpin desa yang harus diutamakan ialah tentang kapabilitas dari calon-calon pemimpin tersebut. Suatu desa tidak hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang bermodalkan kefiguritan namun cacat secara intelektual, moral dan sosial. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang yakni seseorang memiliki akseptabilitas namun ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat.

Pemilihan kepala desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan ditiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa. (Zega Dkk, 2018; Syahfitri Dkk). Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak ikut memilih, berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik (Lubis, dkk, 2019; Oktavia. Dkk., 2018; Ramadani., dkk., 2017; Hardiansyah, dkk., 2019).

Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Cara pemilihan kepala desa dapat bervariasi antara desa satu dengan lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

D. PEMBAHASAN

Seperti halnya desa-desa yang lain yang ada di kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, di Marindal 1 juga melakukan pemilihan kepala desa yang bertepatan pada 18 april 2022, dengan 5 orang kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa , Desa Marindal 1 kecamatan Patumbak kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Namun dari 5 kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa Marindal 1, hanya empat kandidat saja yang berani maju hingga hari di mana pemilihan kepala desa diselenggarakan. Tentu saja hal tersebut menjadi pertanyaan bagi sebagian besar masyarakat desa Marindal 1, yang ambil peran dalam pemilihan calon kepala desa tersebut.

Dari informasi yang didapatkan dari salah satu warga desa Marindal 1, bahwa calon kandidat ke-5 (yang tidak ikut serta hingga akhir dalam penyelenggaraan pemilihan calon kepala desa desa Marindal 1) berniat untuk mengundurkan diri dari pengajuan calon kepala desa, di Marindal 1 kecamatan Patumbak kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Namun ternyata, untuk memundurkan diri dari daftar kandidat calon kepala desa tidaklah hanya sekedar menghapus namanya dari daftar nama calon kepala desa. Namun ia harus membayar pinalti yang cukup besar. Sehingga, beliau memilih untuk melanjutkan pencantuman namanya di daftar calon kepala desa Marindal 1, namun tidak membentuk tim khusus seperti koordinator lapangan dan saksi, yang selalu ada di tiap-tiap calon kepala desa. Tidak hanya tidak tim koordinator lapangan dan saksi, bahkan beliau tidak memasang baliho maupun spanduk yang menggambarkan seruan untuk memilih dirinya.

Sebelum dilaksanakannya penyelenggaraan pemilihan kepala desa, tiap-tiap kandidat melakukan berbagai cara guna menarik minat masyarakat agar memilih dirinya. Seperti menyampaikan latar belakang diri para calon kandidat juga visi dan misi mereka kepada masyarakat yang ada di sekeliling mereka, memasang poster-poster maupun spanduk yang berisikan mengenai seruan kepada masyarakat untuk memilih mereka, membentuk tim khusus seperti koordinator lapangan dan saksi (di mana hampir seluruh tim biasanya memilih kandidat mereka, terlebih lagi bagi mereka yang awalnya tidak mengetahui siapa dan bagaimana calon-calon kepala desa yang akan dipilih, maka biasanya pemikiran mereka akan memilih orang yang baru mereka kenal yaitu calon kandidat di nomor yang mereka saksikan atau koordinatori.

Bentuk Komunikasi yang Dilakukan Oleh Calon-calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa.

Pertama para calon menghubungi rekan-rekan dan juga kerabat guna membicarakan perencanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pembentukan tim koordinator lapangan dan juga saksi. Lalu rekan-rekan ataupun kerabat dari calon tersebut akan menghubungi orang-orang yang mereka rasa pantas untuk menjadi koordinator lapangan dan juga saksi dari kerabat mereka ataupun calon kandidat nomor sekian.

Selanjutnya para calon kepala desa akan mengumpulkan para calon koordinator lapangan dan juga saksi juga masyarakat yang ada di sekitarnya guna menyampaikan latar belakang dan juga visi dan misinya di kediaman masing-masing calon, guna memberikan gambaran bagaimana dirinya kepada orang-orang yang masih banyak belum mengenalnya.

Selanjutnya setiap calon mengumpulkan para koordinator lapangan dan juga saksi yang akan bertugas di hari pelaksanaan pemilihan pilkades. Dalam perkumpulan tersebut, pihak calon akan memberikan arahan mengenai tugas dan tanggung jawab tiap-tiap koordinator lapangan dan juga saksi yang berpegas.

Selama berlangsungnya pelaksanaan pemilihan pihak dari tiap calon kepala desa akan menanyakan mengenai perkembangan dan suasana yang ada di setiap TPS, secara berkala melalui grup chat online yang telah dibentuk sebelumnya baik untuk grup koordinator lapangan maupun grup chat para saksi. Walaupun menggunakan telepon bila ada dari saksi maupun dari koordinator lapangan yang tidak memiliki handphone Android.

Para calon kepala desa desa Marindal 1 melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam seruan untuk memilih diri masing-masing calon hanya menggunakan komunikasi lisan dan melalui baliho ataupun spanduk spanduk yang dipasang di beberapa titik. Mereka tidak menggunakan sosial media, karena tidak semua masyarakat di Marindal 1 paham dan memakai media media sosial. Masih ada dari masyarakat yang bahkan masih menggunakan telepon non internet.

Hal yang menjadi minus dalam kegiatan pemilihan kepala desa, bagi masyarakat. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui siapa yang menjadi calon kepala desa yang akan mereka pilih. Setelah mendapatkan hasil dari pemilihan tersebut pun masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui siapa yang menjadi kepala desa mereka, dikarenakan kurangnya penginformasian kepada masyarakat, hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa merupakan salah satu bentuk apresiasi dalam pelaksanaan pesta rakyat di negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Namun sangat disayangkan karena kurangnya informasi mengenai para calon kepala desa, sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih hanya mengandalkan informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut dan baliho ataupun banner yang dipasang di beberapa titik di jalan. Namun hal tersebut masih dikatakan kurang karena tidak adanya penjelasan secara spesifik guna memperkenalkan siapa sih sebenarnya yang menjadi calon kepala desa tersebut. Berat calon hanya menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya dan orang yang di lingkungannya yang sempat dikumpulkan sebelum hari pemilihan saja bagaimana

dirinya, tidak ada pertemuan ataupun perkenalan kepada masyarakat langsung mengenai diri masing-masing calon.

Karena para calon hanya mengandalkan informasi melalui mulut ke mulut, maka hal tersebut dinyatakan kurang efektif karena penyampaian informasi melalui cara face to face hanya akan tersampaikan kepada orang-orang yang kenal saja, sedangkan masih banyak orang yang saling tidak kenal di desa tersebut. Lalu dengan kurangnya minat baca dan tidak peduli dengan lingkungan dari masyarakat, yang menyebabkan kurang terpakai dengan semestinya baliho maupun banner yang diletakkan di beberapa titik tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

Harun, Rochajat dan Sumarno, A.P. 2006. "Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar". Bandung; CV Mandar Maju.

<https://bellinasution.staff.unri.ac.id/files/2012/03/Materi-Kuliah-Kompol-1.pdf>

<https://www.grobogan.go.id/info/artikel/558-pilkades-dan-pembelajaran-politik>

<https://www.neliti.com/id/publications/160740/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-kepala-kampung-suatu-studi-di-des>

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA DI INDONESIA. Marzha Tweedo. 9 April 2015. hlm. 61. GGKEY:3UT8XC60KED.

Sumarsono S., Susarso A., Mansyur H., dkk. 2006, "Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama.

Suprpto, Tommy.2009. "Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi". Yogyakarta; Med Press.